

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Pustaka

1. *Agency Theory*

Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer sebagai pemilik sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan berada pada tangan para pemegang saham, sedangkan pengelolaan berada pada manajemen.

Teori keagenan menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu kontrak antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan *agency* muncul ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (*principal*), mempekerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut agen, untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan agen.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi Eisenhardt dalam Emirzon (2007). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pada dasarnya konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Konflik keagenan juga dapat terjadi karena tujuan kedua belah pihak mungkin tidak sama. *Principal* dan *agent* saling mencari peluang untuk menguntungkan diri sendiri dan memaksimalkan kepentingannya masing-masing (Messier, *et al*, 2006 :8). Konflik keagenan yang terjadi cenderung menimbulkan biaya *agency* (*agency cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan *agency* yang efektif.

Menurut Jensen dan Meckling *agency relationship* (hubungan keagenan) ada bilamana satu atau lebih individu yang disebut dengan prinsip bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut agen. *Principal* akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, dimana yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen pengelola perusahaan. *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Dilain pihak, manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diperintahkan pemegang saham pemegang saham kepadanya. Agen diwajibkan memberikan laporan periodik kepada *principal* tentang usaha yang dijalkannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Principal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Signaling Theory

Menurut Jama'an (2008) *signaling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. *Good Corporate Governance*

Ⓒ a. Latar belakang *Good Corporate Governance*

Gagasan *corporate governance* muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku bisnis yang dilaksanakan perusahaan. Di masa lalu tujuan perusahaan semata-mata untuk mengejar keuntungan finansial dan mengabaikan faktor-faktor lain. Konsep ini semakin bergeser karena tuntutan masyarakat semakin sadar bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingannya. Naiknya nilai saham, praktek bisnis yang sehat dipenuhi pasokan barang dan perhatian terhadap pelanggaran, produk-produk berkualitas, hak-hak pekerja dan standar upah, isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang harus diperhatikan manajemen. Tuntutan dan kontrol dari berbagai pihak inilah yang mendorong perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*.

Secara teoritis, praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan (*firm value*) dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh direksi dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan pada akhirnya secara umum, *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

b. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut *Indonesian Institute fo Corporate Governance* (IICG, 2010), *good corporate governance* adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.”

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Publication

2006 mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external shareholder in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled (taken from Cadbury Committee of United Kingdom). The objective of corporate governance is to create added value to the stakeholders.”

[Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengendalikan perusahaan (diambil dari *Cadbury Committee of United Kingdom*). Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*.]

c. Prinsip *Good Corporate Governance*

Tujuan *good corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam praktiknya *corporate governance* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *corporate governance*, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Menurut pedoman umum *good corporate governance*, prinsip dasar *good corporate governance* adalah : kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), dan independensi (*independency*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan.

1) Kewajaran (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

5) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

d. Manfaat *Good Corporate Governance*

Priambodo dan Suprayitno (2007) menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan yaitu:

- 1) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah.
- 2) Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang lama.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan.
- 4) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 5) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik (*investor*).

Bagi *investor* penerapan good corporate governance adalah suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Jadi *investor* akan merasa lebih aman karena perusahaan dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak dan bukan hanya pihak tertentu saja.

e. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Dalam penelitian ini, mekanisme *good corporate governance* akan diprosikan dengan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas (PT). dalam dewan komisaris terdapat jabatan komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance* dalam hal pengawasan. Menurut Ujiantho dan Bambang (2007) menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang paling penting. Peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi manajemen laba melalui fungsi monitoring yang dilakukan atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah dan proporsi dewan komisaris.

Dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk memberikan pengawasan dan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen berdasarkan keputusan Direksi PT BEJ Kep-315/BEJ/06-2000 sebagai berikut :

- a) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat bersangkutan.
- b) Tidak memiliki hubungan dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c) Tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d) Harus mengerti peraturan perundang-undangan di pasar modal.

2) Komite Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksiharasan informasi yang terdapat pada para manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan, menurut Meutia (2004). Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

Menurut Kep. 29/PM/2004 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

Karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya penggunaan komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Tugas komite audit juga berkaitan erat dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan serta ketaatan terhadap peraturan.

Komite audit bertindak mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

3) Dewan Direksi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum *good corporate governance* (2006:17) dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Agar pelaksanaan tugas dewan direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Agar pelaksanaan tugas dewan direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya
- c) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Kepemilikan Manajerial

Dari sudut pandang teori akuntansi, kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005 dalam Ujiyantho dan Bambang, 2007)

Menurut Jensen & Meckling dalam Amyulianthy (2012) kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme dalam *corporate governance* karena dengan kepemilikan perusahaan dapat menurunkan *conflict of interest* yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dengan manajer. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak *insiders*, maka *insiders* akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung, bila keputusan itu salah. Dengan demikian kepemilikan saham oleh *insiders* merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Ukuran Kantor Akuntan Publik

Di dalam prinsip dasar GCG terdapat kewajaran, akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat melalui pengungkapan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal. Menurut Mitton (2002) dalam Windah dan Fidelis (2013) menyatakan bahwa pengungkapan yang berkualitas adalah yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang masuk dalam KAP terbesar di dunia, karena KAP ini tentunya akan memastikan adanya transparansi dan mengeleminasi kesalahan-kesalahan dari laporan keuangan perusahaan untuk menjaga reputasinya. Transparansi dapat mengurangi *asymetric information* yang memungkinkan manajer untuk dengan mudah mengambil keuntungan dari *minority shareholders*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kinerja Perusahaan

a. Pengertian kinerja perusahaan

Ketika sebuah perusahaan pertama kali didirikan, biasanya kegiatan perusahaan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut masih sedikit dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen pusat. Namun, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan tersebut, kegiatan yang dilakukan dan karyawan yang terlibat semakin banyak sehingga manajemen pusat tidak mampu lagi menangani seluruh persoalan yang ada dan dapat membuat keputusan untuk seluruh organisasi perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa kinerja perusahaan pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasi kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Hastuti, 2005).

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. *Disclosure* laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. *Disclosure* sebagai salah satu aspek *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan penilaian prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan (Suad Husnan, 1992:214).

b. Analisis Rasio Keuangan

Suad Husnan mengelompokkan kedalam empat tipe dasar rasio keuangan. Berikut adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1) Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendeknya.

Rumus rasio likuiditas :

$$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}} = \text{..... kali}$$

2) Rasio Aktivitas

Rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

Rumus rasio aktivitas :

$$\frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{rata-rata persediaan pada harga jual}} = \text{..... kali}$$

atau

$$\frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{rata-rata persediaan harga pokok}} = \text{..... kali}$$

3) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Rumus-rumus rasio profitabilitas :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. *Net Profit Margin* :

Laba setelah pajak		=.....%

Penjualan		

Nilai NPM dianggap baik jika lebih besar dari nilai NPM rata-rata industri

2. *Return on Assets* :

Laba setelah pajak		=.....%

Total aktiva		

3. *Rentabilitas ekonomis* :

Laba sebelum bunga dan pajak		=.....%

Total aktiva		

4. *Profit Margin* :

Laba sebelum bunga dan pajak		=.....%

Penjualan		

4) *Rasio leverage*

Rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai dengan utang. Jika rasio utang lebih besar dari rasio utang rata-rata industri, maka perusahaan kemungkinan perusahaan akan kesulitan untuk menarik modal pinjaman.

Rumus rasio *leverage* :

Total utang		= %

Total Aktiva		



Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk di mata *principal*.

c. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.

Return on asset yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/ rugi.

d. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja perusahaan menurut Yudha dalam Anton (2012) memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk keperluan merger dan akuisisi. Perusahaan akan melakukan merger atau mengakuisisi perusahaan lain, jelas memerlukan kegiatan penilaian untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Untuk kepentingan restrukturisasi dan kepentingan usaha. Perusahaan yang bermasalah seringkali memerlukan penilaian untuk mengimplementasikan program pemulihan usaha atau restrukturisasi, untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya.
- 3) Untuk *Initial Public Offering (IPO)*. Perusahaan yang akan menjual sahamnya pada umum atau bursa, harus dinilai dengan menggunakan penilaian yang wajar untuk ditawarkan kepada masyarakat atau publik.
- 4) Untuk memperoleh pendapatan wajar atas penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada di dalam neraca
- 5) Memperoleh pembelajaran penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian telah dilakukan untuk mencoba membuktikan bagaimana sebenarnya pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Nama Peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rafriy Amyulianthy (2012)	<i>Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia</i>	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan dewan direksi independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2	Totok Dewayanto (2010)	<i>Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional</i>	Kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, rasio kecukupan modal, eksternal auditor dan ukuran bank berpengaruh terhadap kinerja perbankan.
3	Ratna Wardhani (2006)	<i>Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan</i>	Dewan komisaris berpengaruh positif dan dewan direksi berpengaruh negatif serta komisaris independen dan kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan.
4	Nur Sayidah (2007)	<i>Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik</i>	kualitas <i>corporate governance</i> dan variabel kontrol secara bersama-sama tidak memengaruhi secara signifikan kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROA, ROE dan ROI. Variabel kualitas <i>corporate governance</i> dan variabel kontrol memengaruhi secara signifikan kinerja perusahaan.
5	Theresia Dwi Hastuti (2005)	<i>Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan</i>	struktur kepemilikan dan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hanya <i>disclosure</i> yang berpengaruh positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang dimaksudkan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial dan ukuran KAP terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan menjadi ROA.



6. Kerangka Pemikiran

Keberadaan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi dengan lebih luas kepada investor. Komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Penelitian Amyulianthy (2012) menemukan bahwa ada pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan.

Komite audit dianggap lebih efektif dalam memonitor laporan keuangan perusahaan sehingga diharapkan komite memiliki intensitas pertemuan yang cukup untuk dapat lebih baik dalam memonitor masalah seperti manajemen laba.

Dengan intensitas pertemuan yang rutin, diharapkan akan menciptakan komunikasi yang baik dalam komite, sehingga komite akan semakin efektif dalam melakukan pengawasan dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen seperti praktek manajemen laba.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu proporsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dewan berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dianggap efektif meningkatkan kinerja perusahaan karena karena manajer ikut merasakan langsung manfaat serta menanggung akibat secara langsung dari setiap keputusan yang diambil. Menurut penelitian Wedari (2004) dalam Amyulianthy (2012) kepemilikan *insider ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan insider merupakan insentif bag peningkatan kinerja perusahaan.

Ukuran kantor akuntan publik dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham melalui opini yang diterbitkan. Hal ini dikarenakan kualitas transparansi dan pengungkapan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan risiko perusahaan (Rinaningsih, 2006). Keadaan ini mengakibatkan kemungkinan perusahaan untuk mengalami permasalahan keuangan akan semakin sedikit sehingga kinerja perusahaan semakin baik.

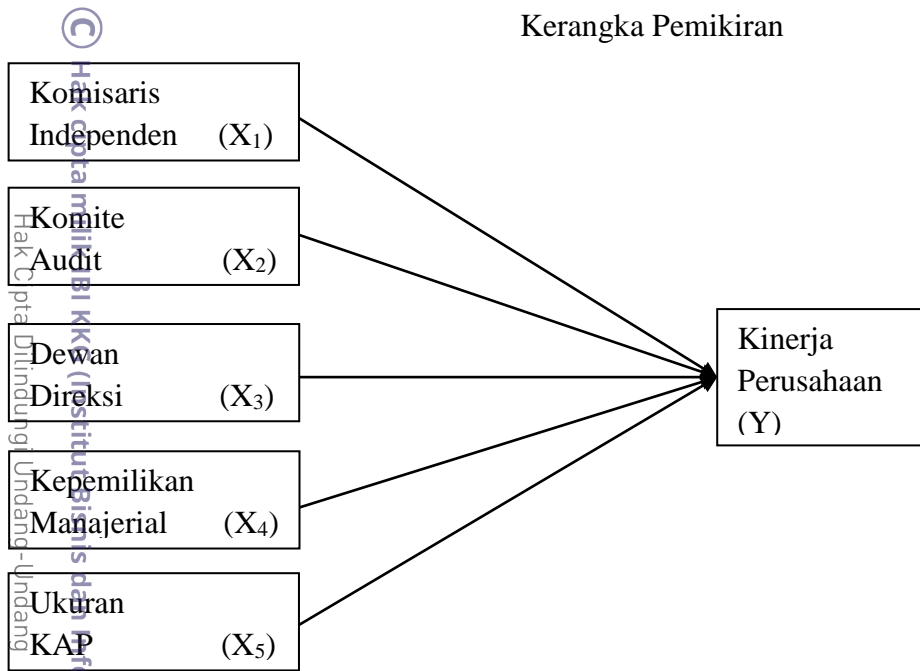
Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dan variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial dan ukuran KAP. Berikut adalah kerangka pemikirannya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



7. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan

Menurut Totok Dewayanto (2010), komisaris independen merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran komisaris independen, semakin efektif pula proses monitor serta pelaporan keuangan (Rafriny, 2012). Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2. Pengaruh komite audit independen terhadap kinerja perusahaan

Menurut Kep. 29/PM/2004 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang





berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Sekar Mayangsari, 2003). Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2 : Ukuran komite audit independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

3. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum *good corporate governance* (2006:17) dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Dalam penelitian Amyulianthy (2012), didapatkan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan ukuran dewan direksi dapat meningkatkan *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Hipotesis penelitian ini adalah :

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan

Dari sudut pandang teori akuntansi, kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan, sebab kepemilikan seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

Hipotesis penelitian ini adalah :

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

5. Pengaruh ukuran KAP terhadap kinerja perusahaan

Kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada *stakeholder* berkenaan dengan pengelolaan perusahaan. Para investor juga melihat bahwa dengan adanya pelaporan keuangan yang baik, menunjukkan perusahaan perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan dalam mengungkapkan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Hal ini didukung dengan penelitian Rinaningsih (2006) yang menyatakan kualitas transparansi dan pengungkapan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor *big-4* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengelolaan risiko perusahaan. Keadaan ini mengakibatkan kemungkinan perusahaan untuk mengalami permasalahan keuangan akan semakin sedikit. Hipotesis penelitian ini adalah :

H5 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

5. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.